

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat sesuatu menjadi lebih baik atau meningkat. Pembangunan nasional yang berlandaskan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah maka membutuhkan pembangunan. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik dan berkesinambungan (Mudrajad, 2006 dan Todaro, 2009).

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. (UNDP: *Humant Development Report* 2000:16). Posisi manusia selalu menjadi tema sentral dalam setiap program pencapaian pembangunan. Dalam skala internasional dikenal tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals*), yang disepakati oleh pemimpin dunia dalam KTT 2000. *MDG* merupakan komitmen masyarakat internasional, khususnya negara yang sedang berkembang, terhadap visi pembangunan. Visi ini secara kuat menempatkan pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Secara nasional beberapa tahun

belakangan ini banyak program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengangkat kondisi sosial dan ekonomi. Kebijakan ini sesuai dengan rekomendasi *United Nations Development Programme (UNDP)* dalam buku "*The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*" (BPS,2007) dengan menekankan perlunya aspek pembiayaan yang lebih memadai bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Secara eksplisit UNDP menyarankan bahwa Indonesia perlu memberikan prioritas investasi yang lebih tinggi pada upaya pembangunan manusia dan cara pembiayaannya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk.

Adapun 3 indikator tersebut yaitu: indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil per kapita. Berikut adalah data dari Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi-Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi dari tahun 2010 – 2014.

Tabel 1.1

Tabel Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sulawesi menurut Provinsi tahun 2010-2014

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
Sulawesi Utara	67.83	68.31	68.31	69.49	69.96
Sulawesi Tengah	63.29	64.27	65.00	65.79	66.43
Sulawesi Selatan	66.00	66.65	67.26	67.92	68.49
Sulawesi Tenggara	65.99	66.52	67.07	67.55	68.07
Gorontalo	62.65	63.48	64.16	64.70	65.17
Sulawesi Barat	59.74	60.63	61.01	61.53	62.24

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam tabel 1.1 dari data Indeks Pembangunan Manusia di enam Provinsi di Pulau Sulawesi tersebut dapat kita lihat dan ketahui bahwa semua nilai rata-rata berkisar antara 59.74 sampai 69.96. Perkembangan IPM pada keenam provinsi yang ada di Pulau Sulawesi tersebut menunjukkan bahwa nilai IPM terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai 59.74 pada tahun 2010 dan nilai IPM tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai 69.96 pada tahun 2014. Nilai IPM di ke enam Provinsi tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meski begitu belum bisa membenarkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di enam Provinsi Pulau Sulawesi itu telah memadai terutama yang di fokuskan penulis yang akan di teliti yakni Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014

Kabupaten/Kota		2010	2011	2012	2013	2014	Perkembangan Tahun 2014
1	Banggai Kepulauan	59,42	60,54	61,09	61,74	62,33	0,96
2	Banggai	64,09	64,63	65,44	66,39	67,11	1,08
3	Morowali	65,25	66,03	66,48	66,86	67,91	1,57
4	Poso	64,81	65,59	66,20	66,94	67,65	1,06
5	Donggala	59,73	60,15	61,33	63,38	63,55	0,27
6	Tolitoli	58,18	59,12	60,05	61,44	61,91	0,76
7	Buol	62,21	63,03	63,98	64,50	65,41	1,41
8	Parigi Moutong	59,17	60,36	61,13	61,98	62,20	0,35
9	Tojo Una-Una	58,33	58,87	59,55	60,32	61,15	1,38
10	Sigi	60,81	61,76	62,88	64,10	64,64	0,84
11	Kota Palu	77,39	78,10	78,36	78,65	79,12	0,60

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.2 di atas merupakan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota. Salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Sumberdaya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari angka pendidikan dan kesehatan, serta juga perekonomian suatu daerah yang semakin membaik.

Berbagai program pembangunan yang telah ada juga di peruntukkan agar mengurangi jumlah penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat sebagai pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses

pembangunan atau menikmati hasil pembangunan (Soegijokoet al, 2001). Masalah pengentasan kemiskinan memang merupakan hal yang rumit, tetapi setidaknya pemerintah bisa berusaha untuk memperbaiki dan menanggulangnya.

Menurut Lanjouw, dkk. (2001) dalam Ginting, et al (2008) dan Mirza (2012) menyatakan bahwa pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan.

Perkembangan jumlah dan presentase penduduk miskin selama 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan tabel 1.3 di bawah ini periode tahun 2010-2014 jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah mengalami penurunan secara signifikan. Tahun 2010 sebanyak 474,99 ribu jiwa (18,07 persen), tahun 2011 (bulan Maret) sebanyak 424,39 ribu jiwa (15,83 persen), tahun 2011 (bulan September) sebanyak 433,66 ribu jiwa (16,04 persen), tahun 2012 (bulan Maret) sebanyak 420,05 ribu jiwa (15,40 persen), tahun 2012 (bulan September) sebanyak 410,98 ribu jiwa (14,94 persen), tahun 2013 (bulan Maret) sebanyak 406,97 ribu jiwa (14,67 persen) dan untuk tahun 2013 (bulan September) sebanyak 400,41 ribu jiwa (14,32 persen) sedangkan untuk tahun 2014 (bulan Maret) sebanyak 392,65 ribu jiwa (13,93 persen). Pada periode September 2013–

Maret 2014 terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin sebesar 7,76 ribu jiwa dengan perubahan 0,39 persen point.

Tabel 1.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tengah 2010-2014

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)			Akselerasi (persen)	Persentase Penduduk Miskin			Perubahan (persen)
	Kota	Desa	Kota+Desa		Kota	Desa	Kota+Desa	
2010	54,22	420,77	474,99	-3,02	9,82	20,26	18,07	-0,91
2011 (Maret)	62,01	362,38	424,39	-10,65	9,46	17,89	15,83	-2,24
2011 (September)	66,14	367,52	433,66	2,18	10,05	17,96	16,04	0,21
2012 (Maret)	61,38	358,67	420,05	-3,14	9,24	17,38	15,40	-0,64
2012 (September)	60,40	350,58	410,98	-2,16	9,02	16,85	14,94	-0,46
2013 (Maret)	60,02	346,95	406,97	-0,98	8,90	16,53	14,67	-0,27
2013 (September)	64,37	336,04	400,41	-1,61	9,45	15,89	14,32	-0,36
2014 (Maret)	67,08	325,57	392,65	-1,94	9,77	15,27	13,93	-0,39

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah, Maret 2014 sebesar 392,65 ribu jiwa (13,93 persen) dibandingkan penduduk miskin September 2013 sebesar 400,41 ribu jiwa (14,32 persen). Hal ini berarti secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7,76 ribu jiwa atau secara relatif mengalami penurunan 0,36 persen point. Jika dilihat tingkat akselerasi pengurangan penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada periode September 2013 - Maret 2014 terjadi penurunan sebesar 1,94 persen. Selama periode September 2013 - Maret 2014, penduduk miskin di daerah perkotaan secara absolut

bertambah sebesar 2,71 ribu jiwa dan daerah perdesaan secara absolut berkurang sebesar 10,47 ribu jiwa (lihat tabel 1.3).

Tabel 1.4
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
menurut Daerah, September 2013 - Maret 2014

Daerah/ Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase Penduduk miskin (%)
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
Perkotaan September 2013	227.894	96.178	324.072	64,37	9,45
Perdesaan September 2013	233.577	59.990	293.567	336,04	15,89
Maret 2014	240.937	63.038	303.975	325,57	15,27
Kota+Desa September 2013	232.192	68.808	301.000	400,41	14,32
Maret 2014	240.115	71.878	311.993	392,65	13,93

Sumber: Diolah dari data Susenas

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Periode September 2013 - Maret 2014, Akselerasi Garis Kemiskinan naik sebesar 3,65 persen, yaitu dari Rp.301.000,- keadaan September 2013 menjadi Rp.311.993, keadaan Maret 2014. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang,

pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2013, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 77,14 persen, turun menjadi 76,96 persen pada Maret 2014. Periode September 2013 - Maret 2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan penurunan dari 2,28 pada September 2013 menjadi 2,18 pada Maret 2014.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan selain jumlah dan persentase penduduk miskin adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Tabel 1.5

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Sulawesi Tengah menurut Daerah, September 2013 - Maret 2014

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
<i>Indeks Kedalaman Kemiskinan</i>			
September 2013	1,32	2,59	2,28
Maret 2014	1,21	2,49	2,18
<i>Indeks Keparahan Kemiskinan</i>			
September 2013	0,28	0,61	0,53
Maret 2014	0,23	0,61	0,52

Sumber: Diolah dari data Susenas

Periode September 2013 - Maret 2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan penurunan dari 2,28 pada September 2013 menjadi 2,18 pada Maret 2014. Hal tersebut berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan atau ke arah yang lebih baik. Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk daerah perkotaan mengalami penurunan dari 1,32 menjadi 1,21 sementara daerah pedesaan menunjukkan penurunan dari 2,59 menjadi 2,49. Artinya di daerah perkotaan ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin sudah lebih baik daripada daerah pedesaan. Indeks Keparahan Kemiskinan secara umum menurun dari 0,53 menjadi 0,52 pada periode yang sama. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin

semakin mengecil. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan untuk perkotaan mencapai 0,28 pada September 2013 menurun menjadi 0,23 pada Maret 2014. Sementara di daerah perdesaan pada periode yang sama tidak mengalami perubahan yakni 0,61. Baik di daerah perkotaan maupun perdesaan ketimpangan dan keparahan rata-rata pengeluaran penduduk miskin sudah semakin mengecil pada periode September 2013 - Maret 2013.

Pemerintah daerah tentunya tidak menginginkan penduduknya banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan atau terkategori penduduk miskin di daerahnya relatif banyak. Untuk itu pendapatan daerah dalam hal ini bersumber salah satunya dari pajak daerah dalam program pembangunan daerah seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar kemiskinan dapat berkurang di daerah tersebut. Pemerintah daerah mengeluarkan belanja pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Bila kesejahteraan masyarakat meningkat, salah satu indikatornya adalah berkurangnya penduduk miskin di daerah tersebut. Upaya meningkatkan IPM juga tidak terlepas dari bagaimana pemerintah daerah menggunakan pendapatan daerahnya untuk belanja daerah pada sektor-sektor yang dapat menaikkan IPM seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah Indonesia, menurut Guritno (2001) yaitu:

a. Peran Stabilisasi

Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda ekonominya kepada pihak swasta/perusahaan. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain.

b. Peran Distribusi

Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapat terdistribusi secara baik dalam masyarakat.

c. Peran Alokasi

Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimilikikan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan. Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan ke-tiga peran yang ada, maka tentunya diperlukan pula dana yang besar sebagai bentuk

pengeluaran segala kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan ke-tiga peran tersebut. Pengeluaran pemerintah ini merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang diambil dan diterapkan melalui ke-tiga peran tersebut.

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah salah satunya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Diharapkan pengeluaran pemerintah pada kedua sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan pendidikan dan kesehatan harus dipandang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, penduduk miskin, pengeluaran pemerintah dalam hal pendidikan dan kesehatan serta total belanja daerah untuk masyarakat adalah beberapa komponen selain pendapatan.

Berdasarkan hal-hal di atas tersebut, indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk melihat bagaimana tingkat kesejahteraan suatu daerah dalam sebuah pembangunan daerah. Oleh karena itu penulis akan mengangkat judul **“Pengaruh Penduduk Miskin, Pajak Daerah, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Serta Total Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Periode 2010 – 2014”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dilakukan penelitian, yaitu:

1. Apakah Penduduk Miskin berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah ?
2. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah ?
3. Apakah Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah ?
4. Apakah Total Belanja berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Untuk menganalisa pengaruh Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Untuk menganalisa pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Untuk menganalisa pengaruh Total Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, adapun manfaat disebutkan antara lain adalah :

- 1. Bagi Penulis :** Penulis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia, penulis juga dapat membandingkan antar teori dan praktek yang terjadi di lapangan. Serta sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

2. **Bagi Instansi Terkait** : Penelitian ini merupakan syarat wajib bagi penulis dalam menyelesaikan studi, maka penulis mengadakan penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan penambahan wawasan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan ekonomi, dengan demikian diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan tepat.
3. **Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan** : Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa-mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sama atau sejenis. Disamping itu, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

1.5. **Sistematika Penulisan Laporan Magang**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan Pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini bertisi tiga bagian: pertama, berisi pendokumentasian dan pengakjian hasil dari penelitian- penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Kedua, mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang didapat akan menjadi landasan

bagi penulisan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih. Ketiga, merupakan formalisasi hipotesis. Hipotesis ini dipandang sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah, sehingga hipotesis yang disusun adalah merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Menguraikan tentang deskripsi data penelitian dan penjelasan tentang hasil dan analisis.

BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi tentang dua hal yaitu, simpulan yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, dan implikasi penelitian yang berisi tentang hasil dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini. sebelumnya, dan implikasi penelitian yang berisi tentang hasil dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini.